

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai, Pentingnya Kompetensi dan Strategi Komunikasi pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPBD Kota Pasuruan dibentuk tahun 2010 berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2010 sebagai amanat. Perpres No. 8 Tahun 2008. BPBD Kota Pasuruan, beralamat di Jl. KH. Mansyur No.1 dan beroperasi 24 jam terintegrasi dengan Pusdalops dan PMK. Memiliki visi "Mewujudkan masyarakat Kota Pasuruan yang tangguh menghadapi bencana" dengan 4 misi utama: Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat Efektif, Pemulihan Pascabencana, dan Tata Kelola yang Baik.
2. Struktur dan Fungsi Organisasi. Struktur BPBD mengacu pada SOTK dan terdiri dari Kepala BPBD ex-officio, Kepala Pelaksana, Unsur Pengarah, Sekretariat, 3 Bidang Teknis yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing bidang memiliki tugas pokok mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana.

3. Kompetensi Teknis

- a. Pendidikan: Secara regulasi sudah ada standar minimal SMA untuk lapangan dan D3/S1 untuk koordinator. Namun pemenuhan belum 100% merata. Petugas inti BPBD, TNI, Polri sudah memenuhi. Relawan dan perangkat desa masih beragam.
- b. Pengalaman: Instansi inti sudah berpengalaman melalui Pusdalops, simulasi, dan penanganan nyata. Relawan dan unsur baru masih perlu pendampingan senior dan gladi rutin.
- c. Pelatihan Fungsional: Wajib menurut Perka BNPB No.10/2010. Realitanya mayoritas petugas inti sudah ikut, tetapi relawan dan desa masih banyak yang hanya dapat pelatihan singkat karena keterbatasan kuota dan anggaran.

4. Kompetensi Manajerial

- a. Integritas: Dibangun melalui 3 pilar: Regulasi UU 24/2007, Pembinaan etika dan anti hoax, dan Keteladanan pimpinan. Petugas dituntut jujur, transparan, dan berpihak ke masyarakat.
- b. Kerja Sama: Mampu. Sudah ada sistem ICS, Pusdalops 24 jam, grup WA bersama, dan rapat harian. Kendala masih ada ego sektoral dan perbedaan SOP.
- c. Pelayanan Publik Sesuai Standar: Sudah 70% berjalan. Standar Kecepatan, Keterbukaan, Satu Pintu, Format DIBI sudah diterapkan di tingkat inti. Di tingkat desa/relawan masih perlu penguatan format dan sarana.
- d. Pengembangan Diri dan Masyarakat: Sudah dilakukan melalui Diklat, workshop, Destana, dan pelatihan relawan. Namun masih terbatas dan belum sistematis karena fokus masih di tanggap darurat.

- e. Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan: Petugas inti mampu. Menggunakan prinsip "Komando, Kendali, Komunikasi". Masih perlu latihan skenario kejutan dan pendelegasian wewenang agar unsur lain berani memutuskan.

5. Kompetensi Sosial Kultural

- a. Adaptasi Tindakan: Sudah mampu. Petugas adaptif dalam 4 hal: media, pesan, target, dan waktu. Contoh: ganti ke HT saat sinyal mati, ganti ke TikTok saat banjir.
- b. Interaksi ke Korban: Menggunakan prinsip "Empati, Hormat, Mengajak". 4 pendekatan: Empatik, Informatif Transparan, Partisipatif, dan Menenangkan. Tujuannya membangun persatuan.
- c. Adaptasi Budaya Lokal: Sudah mulai baik. Dilakukan dengan 5 cara: Bahasa Daerah, Tokoh Lokal, Waktu Adat, Simbol Lokal, Struktur Sosial. Belum merata karena keterbatasan pelatihan lintas budaya.
- d. Empati: Mayoritas petugas memiliki. Diwujudkan lewat mendengarkan, bahasa menguatkan, tindakan memanusiakan, dan menjaga harga diri korban. Terus dilatih via Psikologi Bencana.
- e. Pengelolaan Konflik: Menggunakan komunikasi "Menenangkan, Menengahi, Menyatukan". Tahapannya: Pencegahan, Mediasi saat terjadi, dan Pemulihan setelahnya. Rumus: Dengar → Pahami → Jelaskan → Ajak Solusi.

6. Strategi Komunikasi

- a. Penyebaran Pesan IPI: Dilakukan 4 tahap sistematis: Persiapan Data → Informatif agar "Tahu" → Persuasif agar "Mau" → Inisiatif agar "Bergerak" → Evaluasi.

- b. Menjembatani Kultural Gap Media: Strategi "Menyaring, Menyelaraskan, Memperkuat". Melawan hoax cepat, membuat konten positif berbasis budaya lokal, dan edukasi literasi media.
- c. Perumusan Strategi K-P-M: Kenali Khalayak: Pemetaan sosial sebelum, assessment cepat saat, evaluasi dampak setelah. Perumuskan Pesan: Pakai rumus 3P: Pasti/Informatif, Penenang/Persuasif, Penggerak/Inisiatif. Manfaatkan Media: Sistem "Lapisan Media": Primer 0-1 jam, Sekunder 1-24 jam, Komunitas 24 jam.
- d. Menjelaskan Sebelum dan Saat Bencana: Pendekatan "Jelas-Tenang-Terbukti". Sebelum bencana sebagai "Guru", saat bencana sebagai "Pemimpin" dengan aturan 3K: Konkret, Kilat, Komando.
- e. Ketepatan Komunikasi: Cukup baik. Fase pra 70-80%, tanggap 80-90%, pasca 60-70%. Diukur dari Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Dampak.
- f. Pemahaman Kondisi Lapangan: Melalui assessment cepat, masuk ke posko, dan dengar keluhan warga.
- g. Sistem/Alur Komunikasi: Pra: sosialisasi dan pemetaan. Saat: ICS dan Pusdalops dan 1 pintu informasi. Pasca: update berkala dan psikoedukasi.
- h. Budaya Kerja Tanggap Darurat: Dibangun via simulasi rutin, reward-punishment, dan budaya "satu data satu suara".
- i. Hambatan: Internal: ego sektoral, kelelahan, beda SOP. Eksternal: kepanikan, hoax, jaringan mati, perbedaan bahasa/budaya.
- j. Solusi Perbedaan Persepsi: Metode DUDUK: Dengar, Urai, Damaikan, Ucapkan, Kerjakan.
- k. Solusi Gangguan Fisik/Lingkungan: Sistem 4 Lapis: Teknologi → Cadangan → Tradisional → Manusia.

- l. Mengendalikan Hambatan Emosional: Prinsip 3K: Kenali, Kendalikan, Kemanusiaan dan Buddy System dan Debriefing.
- m. Menghadapi Kendala Bahasa/Budaya: Pendekatan 3P: Pakai Bahasa Lokal, Tokoh Lokal, Hati Lokal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPBD Kota Pasuruan

- a. Pemerataan Pelatihan: Meningkatkan kuota dan frekuensi Diklat Fungsional Pusdalops, Juru Bicara Bencana, dan Komunikasi Krisis hingga ke tingkat relawan dan perangkat desa. Manfaatkan pelatihan daring dari BNPB.
- b. Penguatan Sarana Cadangan: Menambah jumlah HT, powerbank, genset, dan melatih penggunaan media tradisional seperti kentongan dan toa agar komunikasi tidak lumpuh saat listrik/sinyal mati.
- c. Simulasi Rutin: Melaksanakan gladi dan simulasi komunikasi bencana "skenario kejutan" minimal 6 bulan sekali yang melibatkan TNI, Polri, relawan, media, dan masyarakat.
- d. Pembentukan Tim Komunikasi Khusus: Menunjuk 1 tim "Public Information Officer" dan 1 juru bicara resmi agar pesan tidak simpang siur.
- e. Bekerjasama dengan dunia pendidikan/akademik tentang Desa Tangguh Bencana (Destana)

2. Bagi Pemerintah Kota Pasuruan

- a. Anggaran: Meningkatkan alokasi anggaran untuk program Desa Tangguh Bencana, literasi media, dan pengadaan sarana komunikasi kebencanaan.

- b. Kebijakan: Mewajibkan sertifikat pelatihan fungsional sebagai syarat menjadi relawan dan operator Pusdalops di tingkat kelurahan.

3. Bagi Masyarakat dan Relawan

- a. Partisipasi Aktif: Masyarakat diharapkan aktif mengikuti sosialisasi, simulasi, dan menjadi bagian dari "Relawan Komunikasi Lokal" di tingkat RT/RW.
- b. Literasi Informasi: Bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Cek kebenaran ke sumber resmi BPBD sebelum share.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai efektivitas penggunaan media sosial dan strategi komunikasi dalam menghadapi hoax serta pemulihan psikososial pascabencana.

